



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

RENCANA KERJA TAHUN 2023

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2022**

RENCANA KERJA

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

TAHUN 2023



**TENGGARONG
2022**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahNya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menyelesaikan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari menyelesaikan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA Perangkat Daerah) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ke 3 (empat)dari Rencana Kerja yang telah disusun dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun. Melalui Rencana Kerja ini diharapkan sasaran dan tujuan kinerja Organisasi Perangkat Daerah dinas dapat terlihat sehingga nantinya dapat dilakukan evaluasi dan review terhadap pelaksanaan yang telah dilakukan.

Melalui Rencana Kerja (Renja) tersebut yang merupakan suatu dokumen perencanaan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memuat pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam satu tahun sehingga pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dapat dilihat melalui evaluasi dan review agar tahun berikutnya akan menjadi lebih baik lagi.

Semoga Rencana Kerja yang disusun ini nantinya dapat bermanfaat bagi Organisasi Perangkat Daerah khususnya Dinas Perindustrian Dan Perdagangan serta masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara ke depannya.

Kepala Dinas,



ARRAN BOMA PRATAMA, AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740621 199412 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	31
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	43
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	45
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	45
3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	47
4.1 Program dan Kegiatan.....	47
BAB V PENUTUP.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan pada dasarnya mutlak untuk dikembangkan sehubungan pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang terus berkembang sehingga perkembangan kota, kecamatan maupun kelurahan/desa harus mampu menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagi masyarakat. Perkembangan tersebut harus dapat dicermati oleh pihak Pemerintah maupun swasta yang nantinya akan mempunyai peranan penting dalam memajukan daerah.

Perkembangan yang diharapkan dan harus terus maju tersebut tidaklah lepas dari rencana-rencana penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh para aparatur. Oleh sebab itu maka secara berkesinambungan perencanaan yang dibuat dan disusun tidak boleh lepas dari rencana pembangunan secara nasional, propinsi maupun kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus berkembang dalam upaya pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga rencana pembangunan tersebut harus dibuat dan disusun dalam rencana kerja dari program dan kegiatan yang terukur. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun oleh Pemerintah Daerah diharapkan nantinya dapat dijadikan pedoman dan arah pelaksanaan pembangunan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Melalui Rencana Kerja yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang harus dilakukan dinas selaku unsur pelaksanaan dan penyelenggaraan terhadap program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 - 2026 serta implementasinya setiap tahun sehingga evaluasi dalam pelaksanaannya.

Rencana Kerja yang telah disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian dituangkan kedalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah tersebut akan berfungsi sebagai bahan acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam membangun daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan turunan dari Rencana Strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan memperhatikan Rencana Kerja tersebut maka rencana kerja tahun sebelumnya akan dapat dievaluasi terhadap penyelenggaraan tujuan dan sasaran, sehingga program dan kegiatan tahun selanjutnya dapat dipahami dengan berpedoman pada Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP).

Pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dalam tahun berjalan harus dilakukan evaluasi terhadap pengukuran kinerja guna mengetahui sampai sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Organisasi Perangkat Daerah selaku penyusun Rencana Kerja yang selanjutnya disusun dalam bentuk laporan kinerja yang lebih dikenal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, yang meliputi evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah selaku Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2019- 2024 dengan visi **“Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”**. Tahun 2021

merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap penjabaran dari Rencana Kerja 2021 - 2026 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021 sedangkan Tahun 2023 merupakan tahun ketiga bagi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan Rencana Kerja yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan sehingga dapat dianggarkan dalam Rencana Anggaran dan Pendapat Belanja Daerah (RAPBD) tahun selanjutnya.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan tata cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tahapan,tata cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang pengelolaan Pasar Tradisional;
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
16. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah selaras dengan maksud dan tujuan Rencana Strategis yaitu adanya penyediaan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berisi :

- a) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun tujuan penyusunan agar dapat menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan dalam :

- a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKJiP).
- c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran.
- d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Restra Perangkat Daerah

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Program dan Kegiatan

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun anggaran 2021 telah dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan serta mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara pendanaannya bersumber dari dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2021 : **Rp. 32.269.438.150,00**

Terbagi untuk delapan (8) Program yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 23.449.289.984,00 terealisasi sebesar Rp. 21.198.445.707,00, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan anggaran sebesar Rp. 4.874.498.524,00 terealisasi sebesar Rp. 2.076.351.050,00, Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan anggaran sebesar Rp. 199.999.620,00, terealisasi sebesar Rp. 192.877.620,00, . Program Pengembangan Ekspor dengan anggaran sebesar Rp. 68.692.000,00 terealisasi sebesar Rp. 60.290.264,00, Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00, terealisasi sebesar Rp. 147.657.970,00, Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 124.150.000,00 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri dengan anggaran sebesar Rp. 3.345.579.022,00 terealisasi sebesar Rp. 3.075.185.096,00, Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan anggaran sebesar Rp. 31.379.000,00 terealisasi sebesar Rp. 22.884.000,00.

Jumlah Realisasi Keuangan Kegiatan Tahun 2021 :

Rp. 26.522.040.374,00 dengan persentase capaian sebesar **82,19 %**, sedangkan Realisasi Fisik kegiatan sebesar **93,09 %**.

Pelaksanaan program / kegiatan di tahun anggaran 2021, diukur dari pencapaian terhadap sasaran yang ditetapkan.

Realisasi dan Persentase Pelaksanaan Program Kerja Perangkat Daerah

Tabel Pengukuran Kinerja Berdasarkan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021.

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	realisasi
Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat sektor perdagangan	Produktifitas Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	3,025	26,14
Meningkatnya NTB Sektor Industri Pengolahan Non Pertambangan dan Penggalian	Produktifitas Sektor Industri Pengolahan Non Pertambangan dan Penggalian	8.105,84	5.274,07

Evaluasi untuk program Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan belum mencapai target yang telah direncanakan. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pagu anggaran yang direncanakan adalah sebesar **Rp. 32.269.438.150,00** dan dapat terlaksana sebesar **Rp. 26.522.040.374,00** capaian kinerja terhadap program dan kegiatan tercapai 93,09%.

Adapun kendala-kendala yang mempengaruhi kurang maksimalnya pelaksanaan program tersebut adalah:

1. Masih lemahnya SDM yang ada
2. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya alam daerah yang ada.
3. Belum terciptanya iklim usaha yang baik di daerah

4. Adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya kelengkapan usulan berupa proposal untuk pelaksanaan kegiatan bantuan alat kepada masyarakat.

TABEL T-C.29

TABEL T-C.29

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Kutai Kartanegara
Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara
Periode Pelaksanaan : Tahun 2021**

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengacu pada sasaran RKPD :

- Tujuan : 1. Meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan
2. Meningkatkan akses dan tata kelola perdagangan besar dan eceran
Sasaran : 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi
2. Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah
3. Meningkatnya kualitas layanan perdagangan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi thn 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun....)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)	
				K	Rn	K	Rn	K	Rn	K	Rn	K	Rn	K	Rn
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												12	26
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	2	400,000,000	1 dok	219,084,400	2 dok	450,000,000	2 dokume n	255,016,534	3 dok	474,100,934	53	46
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang dibuat	6	350,000,000	6 dok	257,416,610	6 dok	350,000,000	6 dokume n	183,960,200	12 dok	441,376,810	36	21
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												96	30
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	-	-	-	-	-	-	12 bulan	12,062,303,037	12	12,062,303,037	37	46
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pembangunan pasar dan kantor pasar	-	-	-	-	-	-	2 unit	478,920,775				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	32	465,123,600	32 orang	410,354,000	32 orang	465,123,600	1 dokume n	165,123,600	33 orang	575,477,600	13	49
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan dan unit BMD	1,088	124,595,600	1306 unit bmd	89,375,600	1,088 unit bmd	174,595,600	1088 unit bmd	98,310,000	2,394 unit bmd	187,685,600	27	34
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												40	30
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian kerja lapangan petugas	132	150,000,000	-	-	170 stel	170,000,000	93 stel	143,164,820	93 stel	143,164,820	20	27

		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	6	65,000,000	1 orang	7,477,000	6 orang	150,000,000	-	-	1 orang	7,477,000	3	22
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	15	100,000,000	15 orang	79,955,600	15 orang	100,000,000	-	-	15 orang	79,955,600	#####	27
		Administrasi Umum Perangkat Daerah												63	14
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik	12	75,000,000	12 bulan	71,267,500	12 bulan	75,000,000	12 bulan	74,665,500	24 bulan	145,933,000		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat dan perlengkapan kantor	57	200,000,000	85 jenis	199,985,620	85 jenis	200,000,000	85 jenis	136,436,500	170 jenis	336,422,120		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat kebersihan dan alat rumah tangga, jumlah makanan dan	35	350,000,000	35 jenis	320,873,220	50 jenis	360,000,000	30 jenis	211,206,000	jenis			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan	7	200,000,000	7 jenis	176,996,879	7 jenis	200,000,000	7 jenis	82,986,700	14 jenis	259,983,579		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4,500	22,500,000	4,500 eksemplar	19,800,000	4,500 eksemplar	22,500,000	840 eksemplar	5,910,000	eksemplar			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	100	650,000,000	175 orang hari	438,930,845	160 orang hari	850,000,000	100 orang hari	452,480,006	275 orang hari	891,410,851	-	-
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah penataan arsip	4	300,000,000	4 jenis	298,197,060	4 jenis	250,000,000	4 jenis	105,752,500	8 jenis	403,949,560	-	-
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi	-	-	aplikasi	21,610,000	1 aplikasi	100,000,000	1 aplikasi	66,786,300	1 aplikasi	88,396,300		
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										-	-	-	-
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/lapangan	1	506,000,000	1 unit	500,335,050	1 unit	506,380,160	1 unit	488,018,000	2 unit	988,353,050	200	23
3.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor	6	200,000,000	6 jenis	555,069,770	6 jenis	200,000,000	6 jenis	88,796,000	12 jenis	643,865,770	16	27
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	3	200,000,000	3 jenis	193,609,800	3 jenis	200,000,000	3 jenis	19,322,500	6 jenis	212,932,300	-	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	750	4,500,000	750 lembar	4,500,000	750 lembar	4,500,000	404 lembar	4,040,000	1,154 lembar	8,540,000	56	53

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis rekening	4	650,000,000	4 rek	569,643,039	4 rek	650,000,000	4 rek	620,449,875	8 rek	1,190,092,914	22	27
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah gedung yang jasa kebersihan kantor dan jumlah tenaga pendukung non PNS	178	4,268,822,230	177 THL	3,756,584,948	176 THL	4,243,689,584	173 THL	4,121,751,984	350 THL	7,878,336,932	50	51
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40	45,000,000	-	-	40 unit	45,000,000	40 unit	67,296,800	unit			
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	13	500,000,000	-	-	13 unit	500,000,000	13 unit	325,260,080	13 unit	325,260,080	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor	2	450,000,000	3 unit	499,462,000	6 unit	1,100,000,000	1 unit	733,148,096	4 unit	1,232,610,096	100	33
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	100,000,000	4 jenis	100,000,000	4 jenis	100,000,000	4 jenis	99,670,000	8 jenis	199,670,000	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15	100,000,000	-	-	15 unit	100,000,000	2 unit	107,669,900	2 unit	107,669,900		
5	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat Sektor Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN													-
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan													
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar dan sarana perdagangan yang dibangun	6	7,400,000,000	-	-	12 unit	15,650,000,000	2 unit	1,877,511,050	2 unit	1,877,511,050		-

[illegible]

		Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumah dokumen	3	350,000,000	-	-	3 dok	300,000,000	3 dok	124,150,000	1 dok	124,150,000	-	-
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI													
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri													
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah sentra IKM	12	1,150,000,000	-	-	12 unit	6,818,480,000	1 unit	3,026,628,996	4 unit	3,026,628,996		121
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kegiatan	2	350,000,000	1 keg	178,249,500	2 keg	380,000,000	2 kegiatan	48,556,100	3 keg	226,805,600		
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA													
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan													
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam	Jumlah IKM yang diawasi	50	150,000,000	-	-	50 IKM	200,000,000	20 IKM	22,884,000	5 IKM	22,884,000		
					21,176,541,430		9,204,055,701		36,865,268,944		26,894,412,980		34,799,190,793		708
Rata-rata capaian kinerja (%)												93.09%			
Predikat kinerja												Tinggi			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu merumuskan kebijakan teknis bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara selalu proaktif dan kreatif dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai innovator dan motivator.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai dinas teknis yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 juga diberi tanggungjawab sebagai salah satu dinas penghasil dalam upaya mencari dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Indikator yang digunakan untuk mengukur dukungan kinerja layanan publik adalah :

1. Penyelesaian masalah pengaduan konsumen
2. Pertumbuhan omzet industri kecil rumah tangga berbasis komoditas pertanian
3. Pertumbuhan omzet IKM berbasis komoditas pertanian , dan
4. Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi.

Sedangkan dalam pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan melaksanakan pelayanan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

TABEL T-C.30

TABEL T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Sasaran Strategis	SPM / Standar Nasional	IKK	Satuan	Target RENSTRA				Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
1	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah		Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Menengah Pengolahan Non Migas	Persen	3.7	4.1	4.9	4.9	2.3	3.5	
			Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Industri Pengolahan Non migas	Persen	3.8	4.3	4.7	4.9	2.4	3.5	
			Persentase Sentra IKM berbasis Hilirisasi produk pertanian dalam arti luas yang aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Meningkatnya kualitas layanan perdagangan		Pertumbuhan nilai ekspor bersih non migas dan batu bara (nilai ekspor dikurangi nilai impor)	Persen	2	2	2	2	2	2	
			Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh ijin Sesuai dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	55.84	69.87	84.25	100	30.28	42.52	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan metrologi	Nilai	80	85	90	90	60	65	
			Indeks Kualitas Layanan Perdagangan (Pasar)	Nilai	82	87	92	97	75	77	
			Pertumbuhan usaha perdagangan yang menggunakan ecommerce / marketplace	Persen	20	20	20	20	20	20	

2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bebearapa hal yang menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

Permasalahan dan Solusi di Bidang Industri

Pembangunan Industri terutama industri kecil dan menengah dalam pembangunan struktur ekonomi negara-negara sedang berkembang sangat penting dan hal ini telah dibuktikan bahwa peranan industri kecil menengah mampu menjadi tiang penggerak perekonomian akibat badai krisis yang menimpa negeri ini. Barangkali yang perlu menjadi catatan dan perhatian semua pihak adalah daya tahan beberapa industri unggulan yang menjadi tiang penyangga ekonomi mengalami kemunduran akibat ketidak mapuan menghadapi persaingan yang semakin tinggi dalam pasar global. Oleh karenanya upaya pembinaan dan pengembangan terhadap industri terus dilakukan. Pemberdayaan industri di Kabupaten Kutai Kartanegara juga mengembang misi bagi pembinaan dan pengembangan industri dari tahun ke tahun telah mampu memberikan nilai tambah positif terhadap pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan melalui upaya-upaya peningkatan usaha industri, sehingga dampaknya tentu berujung pada efek pengganda yang cukup signifikan terhadap kesejahteraan pengusaha/pengrajin khususnya dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara umumnya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dengan berbagai kegiatan yang di dukung oleh berbeagai program telah dioptimalkan, namun dengan adanya berbagai faktor pembatas maka dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri masih terdapat beberapa permasalahan, sehingga pembiaan dan pengembangan industri tersebut belum bisa mencapai sasaran yang optimal, antara lain disebabkan oleh :

- Tidak tentunya lokasi kegiatan pameran atau acara Dekranasda lainnya sedangkan didalam RKA sudah tercantum lokasi tetapi event/kegiatan Dekranasda dilakukan di Provinsi lainnya
- Masih banyak produk IKM yang belum bisa memasarkan usahanya masuk ke toko modern/supermarket

- Banyak aturan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dengan pihak toko modern agar produk mereka bisa dipasarkan
- Mahalnya biaya sewa tempat untuk outlet di Bandara APT. Pranoto Samarinda mengakibatkan kegiatan tidak bisa dilaksanakan
- Banyaknya kegiatan pameran dengan membawa pelaku usaha dan kita harus mendahulukan dananya sangat sulit untuk dilaksanakan
- Belum keluarnya dana kita mengikuti event pameran memakai dana belum terealisasi sudah dituntut lagi untuk melaksanakan event pameran Masih banyaknya IKM yang belum paham tentang bahaya menggunakan bahan tambahan berbahaya
- Masih banyak IKM yang belum memiliki ijin atau sertifikasi
- SPD kegiatan belum terbit/keluar
- SPD kegiatan belum terbit/keluar

Upaya Yang Dilakukan (Solusi)

Dalam rangka pengembangan industri di Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (PIKM) di Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan solusi yang terkait berbagai kegiatan yang ditunjang dari dana APBD (Desentralisasi), antara lain :

- Di dalam RKA untuk kegiatan promosi tidak mencantumkan lokasi pameran sehingga apabila ada event/kegiatan di lokasi yang lain bisa kita ikuti.
- Dilakukannya pertemuan atau koordinasi antara pelaku usaha dengan toko modern/supermarket
- Mengurangi persyaratan dan masalah pembayaran produk IKM yang sudah laku terjual bisa dibayarkan dengan cepat karena mereka perlu modal untuk melanjutkan usahanya
- Diupayakan untuk sewa tempat Outlet bandara APT. Pranoto bisa dijangkau sehingga pelaku usaha bisa memasarkan produknya.
- Perlunya dana talangan untuk mengikuti event pameran sehingga kita bisa mempromosikan produk unggulan Kab Kukar.
- Dilakukannya pembinaan dan sosialisasi tentang bahaya penggunaan bahan tambahan makanan berbahaya

- Dilakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha (IKM)
- Agar kegiatan berjalan dengan lancar maka diperlukan koordinasi dan SPD dapat terbit sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
- Agar kegiatan berjalan dengan lancar maka diperlukan koordinasi dan SPD dapat terbit sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

Permasalahan dan Solusi di Bidang Perdagangan

Permasalahan

- Lokasi pasar tradisional yang berjauhan
- Tingkat kesadaran pemilik alat yang masih kurang untuk membawa alatnya untuk ditera/tera ulang
- Kurang lengkapnya alat uji standar yang dimiliki UPT Meterologi Legal
- Tingkat kesadaran pemilik alat yang masih kurang untuk membawa alatnya untuk ditera/tera ulang
- Susahnya bekerjasama dengan distributor untuk memfasilitasi barang untuk kegiatan operasi pasar tersebut
- Lokasi tempat pelaksanaan operasi pasar yang jarak tempuhnya jauh dan pelaksanaannya yang harus ke Desa-Desa
- Lambatnya tanggapan dari pihak Kecamatan tentang penunjukan Tim Monitoring Kecamatan
- Instansi terkait yang memiliki data kurang kooperatif dalam memberikan data
- Transport untuk pengangkutan material cukup mahal dan cuaca tidak menentu
- Adanya penolakan dari masyarakat desa terhadap lokasi yang dijadikan tempat dibangunnya pasar ternyata lahan tersebut diperuntukkan untuk oembangunan masjid
- Aktifitas pegadang mingguan dan cuaca yang tidak menentu
- Adanya penolakan dari para pedagang yang berada di luar area pasar gerbang raja
- Adanya aktivitas pasar setiap hari dan cuaca yang tidak menentu.

- Kurang tersedianya SDM Pengelola Administrasi kegiatan yang memiliki kompetensi :
 1. Administrasi Keuangan Daerah
 2. Tenaga Penganalisa
- Jumlah komoditi jagung yang diminta oleh calon mitra usaha sangat banyak dan harga yang diminta pengepul tidak sesuai (harga rendah), sehingga belum ada kesepakatan antara petani jagung dengan calon mitra usaha.
- Menunggu selesainya pembuatan aplikasi oleh pihak ketiga
- Menunggu proses anggaran perubahan dilakukan baru bisa dilaksanakan kegiatan

Solusi

- Perlu diadakan sosialisasi tentang tera dan tera ulang alat UTTP agar pemilik alat menyadari pentingnya untuk menera alat mereka sesuai dengan akurasi setiap alat ukur sehingga antara penjual dan pembeli tidak ada yang merasa dirugikan
- Perlu diadakan sosialisasi tentang tera dan tera ulang alat UTTP agar pemilik alat menyadari pentingnya untuk menera alat mereka sesuai dengan akurasi setiap alat ukur sehingga antara penjual dan pembeli tidak ada yang merasa dirugikan
- Perlunya pemahaman dan pengertian dari agen-agen atau distributor untuk bekerjasama dalam kegiatan operasi pasar barang kebutuhan pokok
- Adanya kepastian tentang penyediaan dana dari kegiatan tersebut
- Melalui koordinasi baik surat menyurat atau ke lapangan, instansi atau perusahaan terkait
- Mencari transportasi yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan
- Kepala desa harus menyediakan lahan untuk pembangunan pasar yang sudah memiliki legalitas dan diperuntukkannya harus jelas untuk pembangunan pasar
- Lokasi pembangunan pasar bebas dari aktifitas perdagangan
- Dibuatkannya pintu masuk dan keluar di area pasar

- Lokasi pasar harus bersih dari aktifitas pasar dan dipagar , dan untuk sementara pedagang direlokasi di tempat lain
- Kegiatan diusulkan di hapus
- Bertambahnya SDM/tenaga kerja
 1. Administrasi Keuangan Daerah
 2. Tenaga Penganalisa
- Peningkatan produksi jagung
- Peningkatan kualitas jagung.
- Terus dilakukan fasilitasi komunikasi kemitraan.
- Dilaksanakan sesuai SPK kontrak pihak ketiga.
- Dilaksanakan secara terus menerus agar target tetap tercapai

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Berikut ini beberapa hal penting dari rancangan awal RKPD yang menjadi landasan pembangunan kaitannya dengan rencana kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan Misi 2 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkompeten dan Misi 4 yaitu Meningkatkan Pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah yang ada di RPJMD Kab. Kutai Kartanegara 2016-2021 dengan tujuan sebagai berikut:

1. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi
3. Meningkatkan pemberdayaan industri kecil dan perdagangan
4. Meingkatkan pengembangan kawasan strategis
5. Meningkatkan motivasi dan etos masyarakat berwirausaha, penciptaan peluang kerja, pelatihan ketrampilan, serta perlindungan dan pengawasan tenaga kerja

Program Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara

1. Tata kelola pemerintahan yang empatik
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
5. Pengentasan Kemiskinan
6. Pertanian dalam arti luas
7. Industri Kecil dan koperasi
8. Perdagangan dan pasar tradisional
9. Pariwisata Lingkungan hidup
10. Infrastruktur penataan ruang dan permukiman

Dari Program Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan program prioritas dari misi ke 2 dan 4 sebagai berikut :

- Industri Kecil
- Perdagangan, dan
- Pengelolaan Pasar

TABEL T-C.31

TABEL T-C. 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Kutai Kartanegara

OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77.00 Nilai	23,130,034,769	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77.00 Nilai	23,760,842,579	
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 Dokumen	575,123,500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 Dokumen	575,123,500	
3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	267,623,500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	267,623,500	
3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	157,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	157,500,000	
3.31.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	150,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	150,000,000	
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	1 Laporan	13,863,027,507	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	1 Laporan	14,493,835,317	
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 orang/bln	13,697,903,907	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 orang/bln	14,328,711,717	
3.31.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	1 laporan	165,123,600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	1 laporan	165,123,600	
3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah		Jumlah dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	135,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah		Jumlah dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	135,000,000	
3.31.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	135,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	135,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	1 Dokumen	337,500,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	1 Dokumen	337,500,000	
3.31.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	200,000,000	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	200,000,000	
3.31.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	67,500,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	67,500,000	
3.31.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 orang	70,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 orang	70,000,000	
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	8 Layanan	1,374,625,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	8 Layanan	1,374,625,000	
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	75,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	75,000,000	
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	140,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	140,000,000	
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	237,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	237,000,000	
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	75,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	75,000,000	
3.31.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	10,125,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	10,125,000	
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	650,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	650,000,000	
3.31.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	112,500,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	112,500,000	
3.31.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	75,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	75,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Jenis Pengadaan	730,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Jenis Pengadaan	730,000,000	
3.31.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit Truk Sampah;	550,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit Truk Sampah;	550,000,000	
3.31.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit	90,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit	90,000,000	
3.31.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit	90,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit	90,000,000	
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	12 Bulan	4,895,209,052	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	12 Bulan	4,895,209,052	
3.31.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2,024,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2,024,000	
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	650,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	650,000,000	
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	4,243,185,052	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	4,243,185,052	
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah	1250 unit	1,219,549,710	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah	1250 unit	1,219,549,710	
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40 unit	141,233,100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40 unit	141,233,100	
3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	378,316,610	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	378,316,610	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	500,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	500,000,000	
3.31.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	100,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	100,000,000	
3.31.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	100,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	100,000,000	
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Cakupan Rekomendasi Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan	61 Persen	250,000,000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Cakupan Rekomendasi Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan	61 Persen	250,000,000	
3 30 02 2.01	Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin toko swalayan		Jumlah dokumen rekomendasi ijin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan yang diterbitkan	61 dokumen	50,000,000	Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin toko swalayan		Jumlah dokumen rekomendasi ijin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan yang diterbitkan	61 dokumen	50,000,000	
3 30 02 2.01 01	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab Kukar	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	70 dokumen	50,000,000	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab Kukar	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	70 dokumen	50,000,000	
3 30 02 2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Surat Tanda Daftar Gudang (TDG) yang diterbitkan per tahun	40 Surat TDG	100,000,000	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Surat Tanda Daftar Gudang (TDG) yang diterbitkan per tahun	40 Surat TDG	100,000,000	
3 30 02 2.02 01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	18 Kec	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	40 dokumen	100,000,000	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	18 Kec	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	40 dokumen	100,000,000	
3 30 02 2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri		Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang diterbitkan	8 Dokumen	50,000,000	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri		Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang diterbitkan	8 Dokumen	50,000,000	
3 30 02 2.03 01	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri		Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	14 dokumen	50,000,000	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri		Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	14 dokumen	50,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 30 02 2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba Lanjutan dari waralaba luar negeri		Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba Lanjutan dari waralaba luar negeri yang diterbitkan	3 dokumen	50,000,000	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba Lanjutan dari waralaba luar negeri		Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba Lanjutan dari waralaba luar negeri yang diterbitkan	3 dokumen	50,000,000	
3 30 02 2.04 01	Fasilitasi pemenuhan lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW)		Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	1 dokumen	50,000,000	Fasilitasi pemenuhan lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW)		Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar	3 dokumen	50,000,000	
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja yang dikembangkan dan dikelola	54.00 persen	24,900,000,000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja yang dikembangkan dan dikelola	54.00 persen	8,015,000,000	
			Pertumbuhan Pendapatan Pasar (Retribusi)	3,35 persen				Pertumbuhan Pendapatan Pasar (Retribusi)	3,35 persen		
			Indeks Kualitas Pasar	53.00 nilai				Indeks Kualitas Pasar	53.00 nilai		
3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan dikelola	4.00 unit	24,600,000,000	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan dikelola	4.00 unit	7,715,000,000	
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Desa Batuah Kec. Loa Janan, Desa Lebaho Ulaq Kec. Muara Kaman, Pasar Penyangga Bukit Biru, Desa Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang, Desa Jongkang Kec. Loa Kulu, Kec. Kembang Janggut, Desa Tuana tuha Kec. Kenohan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	7 unit	24,400,000,000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Desa Batuah Kec. Loa Janan, Desa Lebaho Ulaq Kec. Muara Kaman, Pasar, Revitalisasi pasar Gerbang Raja Mangkurawang, Kec.Sanga-Sanga, Kec. Samboja,	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	8 unit	7,515,000,000	
3 30 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Gerbang Raja (Mangkurawang)	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 unit	200,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Gerbang Raja (Mangkurawang)	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 unit	200,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 30 03 2,02	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerja (Unit Pengelola Pasar) yang memperoleh pembinaan	5.00 unit UPP	300,000,000	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerja (Unit Pengelola Pasar) yang memperoleh pembinaan	5.00 unit UPP	300,000,000	
3 30 03 2,02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kec Samboja dan Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 dokumen	200,000,000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kec Samboja dan Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 dokumen	200,000,000	
3 30 03 2,02 02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Tenggarong, Loa Kulu, Sanga-sanga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 dokumen	100,000,000	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Tenggarong, Loa Kulu, Sanga-sanga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 dokumen	100,000,000	
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Koefisien variasi harga antar waktu	3,67 Persen	1,025,000,000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Koefisien variasi harga antar waktu	3,67 Persen	1,025,000,000	
			Persentase pupuk bersubsidi yang diawasi	98,04 Persen				Persentase pupuk bersubsidi yang diawasi	98,04 Persen		
3 30 04 2,01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dijamin ketersediaannya	13 Jenis	300,000,000	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dijamin ketersediaannya	13 Jenis	300,000,000	
3 30 04 2,01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 laporan	100,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 laporan	100,000,000	
3 30 04 2,01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 laporan	100,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 laporan	100,000,000	
3 30 04 2,01 03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 laporan	100,000,000	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 laporan	100,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 30 04 2,02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah barang kebutuhan pokok dan Barang Penting di tingkat pasar kabupaten yang terkendali harga dan stoknya	50 Persen	425,000,000	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah barang kebutuhan pokok dan Barang Penting di tingkat pasar kabupaten yang terkendali harga dan stoknya	50 Persen	425,000,000	
3 30 04 2,02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	100,000,000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	100,000,000	
3 30 04 2,02 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 laporan	100,000,000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 laporan	100,000,000	
3 30 04 2,02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kec Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Muara kaman	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	225,000,000	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kec Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Muara kaman	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	225,000,000	
3 30 04 2,03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pupuk dan Pestisida yang tersalurkan	8,227 Ton	300,000,000	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pupuk dan Pestisida yang tersalurkan	8,227 Ton	300,000,000	
3 30 04 2,03 01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	18 dokumen	100,000,000	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	18 dokumen	100,000,000	
3 30 04 2,03 02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1 laporan	100,000,000	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1 laporan	100,000,000	
3 30 04 2,03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 laporan	100,000,000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 laporan	100,000,000	
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Persentase pertumbuhan ekspor produk unggulan	100.00 Persen	1,100,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Persentase pertumbuhan ekspor produk unggulan	100.00 Persen	1,100,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 30 05 2,01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah MoU Perdagangan Produk unggulan ekspor	1 MoU	1,100,000,000	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah MoU Perdagangan Produk unggulan ekspor	1 MoU	1,100,000,000	
3 30 05 2,01 01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kec. Marang Kayu dan Kec. Muara badak	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	15 Pelaku Usaha	200,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kec. Marang Kayu dan Kec. Muara badak	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	15 Pelaku Usaha	200,000,000	
3 30 05 2,01 02	Pameran Dagang Nasional	Surabaya, jakarta dan Makasar	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	6 Pelaku Usaha	225,000,000	Pameran Dagang Nasional	Surabaya, jakarta dan Makasar	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	6 Pelaku Usaha	225,000,000	
3 30 05 2,01 03	Pameran Dagang Lokal	Kec. Tenggarong, Kec. Sanga-Sanga, Kota Samarinda, Kota Balikpapan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	8 Pelaku Usaha	200,000,000	Pameran Dagang Lokal	Kec. Tenggarong, Kec. Sanga-Sanga, Kota Samarinda, Kota Balikpapan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	8 Pelaku Usaha	200,000,000	
3 30 05 2,01 04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Surabaya, Yogyakarta dan Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	3 Pelaku Usaha	175,000,000	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Surabaya, Yogyakarta dan Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	3 Pelaku Usaha	175,000,000	
3 30 05 2,01 05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kec Tenggarong, Kec. Loa Kulu, Kec. Sanga-Sanga, Kec. Loa Janan dan Kec. Muara Badak	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	10 Produk	125,000,000	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kec Tenggarong, Kec. Loa Kulu, Kec. Sanga-Sanga, Kec. Loa Janan dan Kec. Muara Badak	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	10 Produk	125,000,000	
3 30 05 2,01 06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kab Kukar	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	40 Pelaku Usaha	175,000,000	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kab Kukar	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	40 Pelaku Usaha	175,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Pertumbuhan pelaku usaha yang tertib niaga	27,50 Persen	375,000,000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Pertumbuhan pelaku usaha yang tertib niaga	27,50 Persen	375,000,000	
3 30 06 2,01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	18,47 Persen	375,000,000	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	18,47 Persen	375,000,000	
3 30 06 2,01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	18 Kecamatan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1,500 unit	275,000,000	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	18 Kecamatan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1,500 unit	275,000,000	
3 30 06 2,01 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	18 Kecamatan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1000 orang	100,000,000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	18 Kecamatan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1000 orang	100,000,000	
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase Produk dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan di toko modern	97,60 persen	675,000,000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase Produk dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan di toko modern	97,60 persen	675,000,000	
3 30 07 2,01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase realisasi promosi	60 persen	675,000,000	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase realisasi promosi	60 persen	675,000,000	
3 30 07 2,01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Kukar	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20 UMKM	125,000,000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Kukar	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20 UMKM	125,000,000	
3 30 07 2,01 02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Kukar	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	25 UMKM	425,000,000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Kukar	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	25 UMKM	425,000,000	Program dedikasi Bupati "Program Usaha Kecil Idaman"
3 30 07 2,01 03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kaltim	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 dokumen	125,000,000	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kaltim	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 dokumen	125,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Dokumen perencanaan dan unit sentra pengembangan industri	2.00 dokumen	3,195,000,000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Dokumen perencanaan dan unit sentra pengembangan industri	2.00 dokumen	8,995,000,000	
3 31 02 2,01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen perencanaan dan jumlah sentra	1.00 Sentra IKM	3,195,000,000	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen perencanaan dan jumlah sentra	1.00 Sentra IKM	8,995,000,000	
3 31 02 2,01 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kec. Kota Bangun dan Kec. Tenggara Seberang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 dokumen	125,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kec. Kota Bangun dan Kec. Tenggara Seberang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 dokumen	125,000,000	
3 31 02 2,01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	525,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	525,000,000	
3 31 02 2,01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kec. Samboja, Muara Badak dan Marang Kayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	1,200,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kec. Samboja, Muara Badak dan Marang Kayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	7,000,000,000	Penambahan dana diambil dari sub kegiatan penyediaan sarana distribusi perdagangan, untuk pembangunan sentra IKM dalam rangka melaksanakan program dedikasi Bupati "program Hilirisasi Produk Pertanian"
3 31 02 2,01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kec. Kenohan, Kembang Janggut, Loa Kulu, Muara Jawa, Muara kaman, Samboja, Tenggara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	1,195,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kec. Kenohan, Kembang Janggut, Loa Kulu, Muara Jawa, Muara kaman, Samboja, Tenggara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	1,195,000,000	
3 31 02 2,01 06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	4 dokumen	150,000,000	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	4 dokumen	150,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Cakupan pemberian rekomendasi izin usaha industri	100 Persen	200,000,000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Cakupan pemberian rekomendasi izin usaha industri	100 Persen	200,000,000	
3 31 03 2,01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah	83,84 Persen	200,000,000	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah	83,84 Persen	200,000,000	
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah	0,04 Persen				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah	0,04 Persen		
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di wilayah Kabupaten	0,04 Persen				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di wilayah Kabupaten	0,04 Persen		
3 31 03 2,01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINAS yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	10 dokumen	75,000,000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINAS yang Terintegrasi dengan	10 dokumen	75,000,000	
3 31 03 2,01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Kec. Tenggarong, Kec. Tenggaroang seberang, Kec. Kembang janggut, Kec. Muara Jawa, Kec. Loa Janan dan Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	20 dokumen	125,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Kec. Tenggarong, Kec. Tenggaroang seberang, Kec. Kembang janggut, Kec. Muara Jawa, Kec. Loa Janan dan Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	20 dokumen	125,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase IKM yang dalam SIINAS	3,87 Persen	525,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase IKM yang dalam SIINAS	3,87 Persen	525,000,000	
3 31 04 2,01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah IKM yang mendapatkan informasi industri secara lengkap dan terkini	38 IKM	525,000,000	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah IKM yang mendapatkan informasi industri secara lengkap dan terkini	38 IKM	525,000,000	
3 31 04 2,01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 dokumen	150,000,000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 dokumen	150,000,000	
3 31 04 2,01 02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 dokumen	250,000,000	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 dokumen	250,000,000	
3 31 04 2,01 03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 dokumen	125,000,000	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 dokumen	125,000,000	
					55,375,034,769					44,920,842,579	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini di uraikan hasil telaah terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat, assosiasi, SKPD Kabupaten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan dan Kabupaten.

TABEL T-C.32

Tabel T-C.32

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Kutai Kartanegara**

OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Pagu usulan	Rekomendasi
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			
1.1				Pengadaan lahan pasar desa	2,500,000,000	Dipertimbangkan
1.2				Pembangunan lapak pasar desa Tradisional dan Modern	2,000,000,000	Dipertimbangkan
1.3				Pembangunan pasar desa	2,500,000,000	Dipertimbangkan
1.4				Pembangunan Pasar Desa	2,500,000,000	Dipertimbangkan
1.5				Pembangunan Pasar Desa	2,500,000,000	Dipertimbangkan
1.6				Pembangunan Pasar Desa	2,500,000,000	Dipertimbangkan
1.7				Revitalisasi pasar	2,500,000,000	Dipertimbangkan
1.8				Revitalisasi pasar	2,500,000,000	Dipertimbangkan
1.9				Pembangunan Pasar Desa	2,500,000,000	Dipertimbangkan
1.10				Revitalisasi Pasar Sangasanga	2,500,000,000	Dipertimbangkan
1.11				Pembangunan Pasar Desa	2,500,000,000	Dipertimbangkan
1.12				Pembangunan Pagar Keliling Pasar Desa	2,500,000,000	Dipertimbangkan

1.13				Revitalisasi pasar	2,500,000,000	Dipertimbangkan
1.14				Pembuatan Pagar Pasar Desa	2,500,000,000	Dipertimbangkan
2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat			
2.1				Pelatihan dan Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kerajinan Tangan	125,000,000	Di Proses (diterima)
2.2				Pelatihan Pembuatan Kue		Di Proses (diterima)
2.3				Home Industri Gula Gait	125,000,000	Di Proses (diterima)
2.4				Home Industri Kue Teng-teng	150,000,000	Di Proses (diterima)
				Pelatihan Pengolahan Makanan Menggunakan Bahan Baku Lokal	100,000,000	Di Proses (diterima)
				Pelatihan dan Sertifikasi bagi Home Industri Pembuat Tahu Tempe.	100,000,000	Di Proses (diterima)
				Fasilitasi pelatihan dan sertifikasi bagi IKM	100,000,000	Di Proses (diterima)
				Pelatihan dan pembinaan bagi pelaku usaha UMKM	100,000,000	Di Proses (diterima)
				Bantuan permodalan home industri dan pertanian hortikultura	100,000,000	Di Proses (diterima)
				Pengembangan Usaha kecil Menengah	100,000,000	Di Proses (diterima)
				Pelatihan budi daya lebah madu	100,000,000	Di Proses (diterima)
				Pelatihan keterampilan kerja	100,000,000	Di Proses (diterima)
				Pelatihan/kursus UMKM	100,000,000	Di Proses (diterima)
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			

2.5				Pembuatan Kios PKK Kelurahan Sarijaya	100,000,000	Di Proses (diterima)
2.6				Pembuatan Kios Merah Putih	100,000,000	Di Proses (diterima)
				Pengadaan Mesin Pres Kemasan	100,000,000	Di Proses (diterima)
				Pengadaan Mesin Pemotong Kripik	100,000,000	Di Proses (diterima)
				Pembangunan Koperasi Kerajinan Tangan Lengkap dengan Show Case	100,000,000	Di Proses (diterima)
				Bantuan alat produksi IKM Mesin cetak bata	100,000,000	Di Proses (diterima)
				Bantuan Alat Produksi IKM	100,000,000	Di Proses (diterima)
				Pengadaan Bantuan Alat Penggiling Kedelai Guna produksi Tahu Tempe	100,000,000	Di Proses (diterima)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah dan prioritas pembangunan nasional merupakan hal yang sangat penting dalam menyusun target dengan memperhatikan program nasional, propinsi dan kabupaten. Rencana kerja memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara yang disusun sesuai tugas dan fungsi guna mewujudkan tujuan dan sasaran kerja yang telah ditetapkan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 telah ditetapkan tujuan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Meningkatnya Pengelolaan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Daerah
2. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah.
3. Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif.
4. Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah.

B. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai antara lain :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah.
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Perdagangan.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan dapat di lihat pada tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023.

TABEL TC-33

TABEL T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Kutai Kartanegara

OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		77.00 Nilai	23,760,842,579			78.00 Nilai	23,180,034,769
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		6 Dokumen	575,123,500			6 Dokumen	575,123,500
3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 dokumen	267,623,500	APBD		1 dokumen	267,623,500
3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4 laporan	157,500,000	APBD		4 laporan	157,500,000
3.31.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 laporan	150,000,000	APBD		1 laporan	150,000,000
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel		1 Laporan	14,493,835,317			1 Laporan	13,863,027,507
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	124 orang/bln	14,328,711,717	APBD		124 orang/bln	13,697,903,907
3.31.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 laporan	165,123,600	APBD		1 laporan	165,123,600
3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah	Jumlah dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		1 Dokumen	135,000,000			1 Dokumen	135,000,000
3.31.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 laporan	135,000,000	APBD		1 laporan	135,000,000
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian		1 Dokumen	337,500,000			1 Dokumen	337,500,000
3.31.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 paket	200,000,000	APBD		1 paket	200,000,000
3.31.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6 orang	67,500,000	APBD		6 orang	67,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.31.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15 orang	70,000,000	APBD		15 orang	70,000,000
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah		8 Layanan	1,374,625,000			8 Layanan	1,424,625,000
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 paket	75,000,000	APBD		1 paket	75,000,000
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 paket	140,000,000	APBD		1 paket	140,000,000
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2 paket	237,000,000	APBD		2 paket	237,000,000
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2 paket	75,000,000	APBD	Cetak Karcis Retribusi Pasar (PAD) / Cetak Retribusi Pasar Masih Memerlukan Anggaran Sebesar Rp. 75.000.000,-	1 paket	75,000,000
3.31.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 dokumen	10,125,000	APBD		dokumen	10,125,000
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100 laporan	650,000,000	APBD		laporan	700,000,000
3.31.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 dokumen	112,500,000	APBD		1 dokumen	112,500,000
3.31.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 dokumen	75,000,000	APBD		1 dokumen	75,000,000
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3 Jenis Pengadaan	730,000,000			3 Jenis Pengadaan	730,000,000
3.31.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 Unit Truk Sampah;	550,000,000	APBD		1 Unit Truk Sampah;	550,000,000
3.31.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6 unit	90,000,000	APBD		6 unit	90,000,000
3.31.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6 unit	90,000,000	APBD		3 unit	90,000,000
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan		12 Bulan	4,895,209,052			12 Bulan	4,895,209,052
3.31.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 laporan	2,024,000	APBD		1 laporan	2,024,000

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 laporan	650,000,000	APBD		1 laporan	650,000,000
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2 laporan	4,243,185,052	APBD		2 laporan	4,243,185,052
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah		1250 unit	1,219,549,710			1350 unit	1,219,549,710
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	40 unit	141,233,100	APBD		40 unit	141,233,100
3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13 unit	378,316,610	APBD		13 unit	378,316,610
3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5 unit	500,000,000	APBD		5 unit	500,000,000
3.31.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15 unit	100,000,000	APBD		15 unit	100,000,000
3.31.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15 unit	100,000,000	APBD		15 unit	100,000,000
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Rekomendasi Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan		61 Persen	250,000,000			68 Persen	325,000,000
3 30 02 2.01	Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin toko swalayan	Jumlah dokumen rekomendasi ijin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan yang diterbitkan		61 dokumen	50,000,000			68 dokumen	75,000,000
3 30 02 2.01 01	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab Kukar	70 dokumen	50,000,000			80 dokumen	75,000,000
3 30 02 2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Surat Tanda Daftar Gudang (TDG) yang diterbitkan per tahun		40 Surat TDG	100,000,000			52 Surat TDG	100,000,000
3 30 02 2.02 01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	18 Kec	40 dokumen	100,000,000	APBD		52 dokumen	100,000,000
3 30 02 2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang diterbitkan		8 Dokumen	50,000,000			11 dokumen	75,000,000
3 30 02 2.03 01	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik		14 dokumen	50,000,000			17 dokumen	75,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 30 02 2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba Lanjutan dari waralaba luar negeri	Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba Lanjutan dari waralaba luar negeri yang diterbitkan		3 dokumen	50,000,000			3 dokumen	75,000,000
3 30 02 2.04 01	Fasilitasi pemenuhan lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik luar negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri		3 dokumen	50,000,000			4 dokumen	75,000,000
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja yang dikembangkan dan dikelola		54.00 persen	8,015,000,000			65.00 persen	7,260,000,000
		Pertumbuhan Pendapatan Pasar (Retribusi)		3,35 persen				3,62 persen	
		Indeks Kualitas Pasar		53.00 nilai				48.00 nilai	
3 30 03 2,01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan dikelola		4.00 unit	7,715,000,000			5.00 unit	6,930,000,000
3 30 03 2,01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Desa Batuah Kec. Loa Janan, Desa Lebaho Ulaq Kec. Muara Kaman, Pasar Mangkurawang, pasar Kec. Loa Kulu, Pasar Kec. Sanga-Sanga, Pasar Kec. Samboja Kelurahan samboja Kuala, Desa Separi Kec Tenggarong Seberang, Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja	8 unit	7,515,000,000	APBD		2 unit	6,680,000,000
3 30 03 2,01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Gerbang Raja (Mangkurawang)	1 unit	200,000,000	APBD		1 unit	250,000,000
3 30 03 2,02	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerja (Unit Pengelola Pasar) yang memperoleh pembinaan		5.00 unit UPP	300,000,000			5.00 unit UPP	330,000,000
3 30 03 2,02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kec Samboja dan Kec. Anggana	2 dokumen	200,000,000	APBD		2 dokumen	200,000,000
3 30 03 2,02 02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Tenggarong, Loa Kulu, Sanga-sanga	1 dokumen	100,000,000	APBD		1 dokumen	130,000,000
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga antar waktu		3,67 Persen	1,025,000,000			3,62 Persen	1,250,000,000
		Persentase pupuk bersubsidi yang diawasi		98,04 Persen				98,21 Persen	
3 30 04 2,01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dijamin ketersediaannya		13 Jenis	300,000,000			13 Jenis	375,000,000
3 30 04 2,01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kukar	1 laporan	100,000,000	APBD		1 laporan	125,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 30 04 2,01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kukar	1 laporan	100,000,000	APBD		1 laporan	125,000,000
3 30 04 2,01 03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kukar	1 laporan	100,000,000	APBD		1 laporan	125,000,000
3 30 04 2,02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah barang kebutuhan pokok dan Barang Penting di tingkat pasar kabupaten yang terkendali harga dan stoknya		50 Persen	425,000,000			58,33 Persen	500,000,000
3 30 04 2,02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	1 laporan	100,000,000	APBD		1 laporan	125,000,000
3 30 04 2,02 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Kukar	1 laporan	100,000,000	APBD		1 laporan	125,000,000
3 30 04 2,02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kec Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Muara kaman	1 laporan	225,000,000	APBD		1 laporan	250,000,000
3 30 04 2,03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pupuk dan Pestisida yang tersalurkan		8,227 Ton	300,000,000			84,546 Ton	375,000,000
3 30 04 2,03 01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kab. Kukar	18 dokumen	100,000,000	APBD		18 dokumen	125,000,000
3 30 04 2,03 02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Kukar	1 laporan	100,000,000	APBD		1 laporan	125,000,000
3 30 04 2,03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kab. Kukar	1 laporan	100,000,000	APBD		1 laporan	125,000,000
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan ekspor produk unggulan		100.00 Persen	1,100,000,000			100.00 Persen	1,250,000,000
3 30 05 2,01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah MoU Perdagangan Produk unggulan ekspor		1 MoU	1,100,000,000			1 MoU	1,250,000,000
3 30 05 2,01 01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Kec. Marang Kayu dan Kec. Muara badak	15 Pelaku Usaha	200,000,000	APBD		15 Pelaku Usaha	225,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 30 05 2,01 02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Surabaya, Jakarta dan Makasar	6 Pelaku Usaha	225,000,000	APBD		6 Pelaku Usaha	250,000,000
3 30 05 2,01 03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Kec. Tenggarong, Kec. Sanga-Sanga, Kota Samarinda, Kota Balikpapan	8 Pelaku Usaha	200,000,000	APBD		8 Pelaku Usaha	225,000,000
3 30 05 2,01 04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Surabaya, Yogyakarta dan Semarang	3 Pelaku Usaha	175,000,000	APBD		3 Pelaku Usaha	200,000,000
3 30 05 2,01 05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Kec Tenggarong, Kec. Loa Kulu, Kec. Sanga-Sanga, Kec. Loa Janan dan Kec. Muara Badak	10 Produk	125,000,000	APBD		10 Produk	150,000,000
3 30 05 2,01 06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Kab Kukar	40 Pelaku Usaha	175,000,000	APBD		40 Pelaku Usaha	200,000,000
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pertumbuhan pelaku usaha yang tertib niaga		27,50 Persen	375,000,000			28,25 Persen	450,000,000
3 30 06 2,01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		18,47 Persen	375,000,000			19,06 Persen	450,000,000
3 30 06 2,01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	18 Kecamatan	1,500 unit	275,000,000	APBD	Pagu Anggaran 100 Juta Untuk Sewa Gedung Metrologi dan 175 Juta Untuk Kegiatan Tera Ulang Alat UTTP (PAD)	1,500 unit	300,000,000
3 30 06 2,01 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	18 Kecamatan	1000 orang	100,000,000	APBD		1000 orang	150,000,000
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan di toko modern		97,60 persen	675,000,000			98,56 persen	715,000,000
3 30 07 2,01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase realisasi promosi		60 persen	675,000,000			70 persen	715,000,000
3 30 07 2,01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Kukar	20 UMKM	125,000,000	APBD		UMKM	150,000,000
3 30 07 2,01 02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Kab Kukar	25 UMKM	425,000,000	APBD	Program Dedikasi Bupati "Program Usaha Kecil Idaman"	20 UMKM	430,000,000
3 30 07 2,01 03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kaltim	1 dokumen	125,000,000	APBD		1 dokumen	135,000,000
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dokumen perencanaan dan unit sentra pengembangan industri		2.00 dokumen	8,995,000,000			2.00 dokumen	20,045,000,000
3 31 02 2,01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan jumlah sentra		1.00 Sentra IKM	8,995,000,000			1.00 Sentra IKM	20,045,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 31 02 2,01 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kec. Kota Bangun dan Kec. Tenggarong Seberang	1 dokumen	125,000,000			1 dokumen	75,000,000
3 31 02 2,01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab Kukar	1 dokumen	525,000,000	APBD	Program Dedikasi Bupati "Program Hilirisasi Produk Pertanian"	1 dokumen	200,000,000
3 31 02 2,01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kec. Samboja, Muara Badak dan Marang Kayu	1 dokumen	7,000,000,000	APBD		1 dokumen	18,325,000,000
3 31 02 2,01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Kukar	1 dokumen	1,195,000,000	APBD		2 dokumen	1,270,000,000
3 31 02 2,01 06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab Kukar	4 dokumen	150,000,000	APBD		4 dokumen	175,000,000
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Cakupan pemberian rekomendasi izin usaha industri		100 Persen	200,000,000			100 Persen	250,000,000
3 31 03 2,01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah		83,84 Persen	200,000,000			88,65 Persen	250,000,000
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah		0,04 Persen				0,06 Persen	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di wilayah Kabupaten		0,04 Persen				0,06 Persen	
3 31 03 2,01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Kab Kukar	10 dokumen	75,000,000	APBD		10 dokumen	100,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 31 03 2,01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Tenggarong, Kec. Tenggarong seberang, Kec. Kembang janggut, Kec. Muara Jawa, Kec. Loa Janan dan Kec. Anggana	20 dokumen	125,000,000	APBD		20 dokumen	150,000,000
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang dalam SIINAS		3,87 Persen	525,000,000			4,64 Persen	650,000,000
3 31 04 2,01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mendapatkan informasi industri secara lengkap dan terkini		38 IKM	525,000,000			44 IKM	650,000,000
3 31 04 2,01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab Kukar	1 dokumen	150,000,000	APBD		1 dokumen	225,000,000
3 31 04 2,01 02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kab Kukar	1 dokumen	250,000,000	APBD		1 dokumen	250,000,000
3 31 04 2,01 03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab Kukar	1 dokumen	125,000,000	APBD		1 dokumen	175,000,000
		Jumlah			44,920,842,579				

INDIKATOR UTAMA KINERJA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2021-2026

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan IKU	Pencapaian IKU		
						Strategi	Arah Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan Berbahagia	Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai LKJiP Disperindag	Hasil Penilaian SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat	Penyelenggaraan reformasi birokrasi	Penerapan dan pemantapan reformasi birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
		Meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan	LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) kategori industri pengolahan	Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Menengah Pengolahan Non Migas	Jumlah Nilai Tambah Bruto Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran dibagi Total Tenaga Kerja sektor Perdagangan Besar	Penguatan pembangunan dan struktur sektor industri kecil menengah berbasis keunggulan Daerah	Peningkatan kemudahan dan pengawasan layanan terhadap perijinan Pengembangan basis data dan informasi perencanaan bidang industry	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
				Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Industri Pengolahan Non migas			Penguatan Kapasitas dan pembinaan Kompetensi SDM Industri	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
				Persentase Sentra IKM berbasis Hilirisasi produk pertanian dalam arti luas yang aktif			Pengembangan Kawasan IKM yang terintegrasi dan berbasis produk unggulan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Meningkatkan akses dan tata kelola Perdagangan besar dan eceran	LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) kategori Perdagangan Besar dan Eceran	Pertumbuhan nilai ekspor bersih non migas dan batu bara (nilai ekspor dikurangi nilai impor)	Jumlah Nilai Tambah Bruto Subsektor Industri Pengolahan dibagi Total Tenaga Kerja sektor Perindustrian	Penguatan penguasaan pasar dalam negeri dan luar negeri serta Jaringan Distribusi Barang	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Pemasaran dengan pihak ketiga	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
				Pertumbuhan usaha perdagangan yang menggunakan ecommerce/ marketplace			penguatan jejaring perdagangan produk lokal melalui ekosistem offline dan perdagangan secara elektronik (ecommerce)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
				Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)			fasilitasi kemudahan dan pendampingan kepada pelaku dalam legalitgas usaha/perijinan	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan metrologi		penguatan layanan perdagangan yang tertib (niaga, mutu dan ukur) dan pemberdayaan konsumen	Optimalisasi pengawasan dan layanan metrologi serta perlindungan konsumen	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
				Indeks Kualitas Layanan Perdagangan (Pasar)			penguatan Fungsi dan Peran Pasar Daerah Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian daerah	PROGRAM PENGGUNAAN PEMASARAN DAN PRODUK DALAM NEGERI

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021- 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Tenggarong, Maret 2022

Kepala Dinas,



ARFAN BOMA PRATAMA, AP.

Pembina Tingkat I
NIP.19740621 199412 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Jend. Sudirman No. 1 RT. 04 Kelurahan Melayu Telp. (0541) 661158
Website : disperindag.kukarkab.go.id E-mail : disperindag@mail.kukarkab.go.id Kode Pos 75512

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B- 344 /DISPERINDAG/Set.II /009/III/2022**

**TENTANG
RENCANA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) berpedoman pada RPJMD tersebut ;

b. bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;

c. bahwa berdasarkan maksud tersebut, maka dipandang perlu untuk ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan ,tata cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tahapan,tata cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang pengelolaan Pasar Tradisional.
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023

KESATU : Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023, selanjutnya disebut dengan RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023, merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perindustrian dan Perdagangan periode satu tahun yaitu Tahun 2023 ;

- KEDUA** : Sistematisa penulisan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang disesuaikan dengan pembagian urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 30 Maret 2022

Kepala Dinas,



ARFAN BOMA PRATAMA, AP.

Pembina Tingkat I

NIP. 19740621 199412 1 001



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

